

Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru

Ade Diba Hutabarat¹ Dia Meirina Suri²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution

No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

adedibahutabarat@student.uir.ac.id diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Received : June 8, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The Indonesian government or the President formed a body that was given certain tasks in terms of monitoring drugs and food, called the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM). In this research, the method used is a qualitative research method with a descriptive survey approach, where this research describes the research object in accordance with existing facts as they occur in the field. In the implementation of supervision carried out by the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Pekanbaru in monitoring illegal cosmetic products, namely pre market and post market. In its implementation, BBPOM makes it easy for the public to find information about cosmetic products that are suitable for consumption, how to obtain permits, standards for producing and marketing cosmetic products, regulations that can be the basis for producing cosmetics which can be accessed on the website and through BPOM MOBILE. In it there is also an annual report where you can see comparisons between each year in the implementation of monitoring illegal cosmetics. And it can be seen in this research that there are inhibiting factors in implementing supervision, which the author can conclude is that there are still many consumers who do not understand how to differentiate illegal cosmetic products from those that are good for consumption, lack of human resources, and sellers of illegal cosmetic products who still violate standards are quietly doing the trading but it is also a factor of consumers who are used to products that provide instant results without thinking about the side effects.

Keywords: BBPOM, Illegal, Consumer

Abstrak

Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survey deskriptif yang mana penelitian ini menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terjadi dilapangan. Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik ilegal yaitu pre market dan post market. Dalam pelaksanaan pihak BBPOM memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk kosmetik yang layak dikonsumsi, bagaimana cara mendapatkan izin, standar dari memproduksi dan memasarkan produk kosmetik, peraturan-peraturan yang dapat menjadi dasar untuk memproduksi kosmetik yang dapat di akses dalam website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya juga terdapat laporan tahunan yang dapat dilihat perbandingan pada tiap tahunnya dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ilegal. Dan dapat dilihat dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik ilegal dengan yang baik dikonsumsi, kurang sumber daya manusia, serta penjual produk kosmetik ilegal yang masih melanggar standar diam-diam melakukan perdagangan.

Kata Kunci: BBPOM, Ilegal, Konsumen

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Badan ini dikoordinasikan oleh menteri Kesehatan dan menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi diseluruh Indonesia.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan dimasyarakat. Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BBPOM.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memutuskan perlunya melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pegawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru”. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat banyak beredarnya produk kosmetik ilegal dan berbahaya, tidak memiliki izin edar, dan tidak melalui uji lab dari BBPOM sehingga tidak ada jaminan keamanan terhadap produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Henri Fayol (1841-1925), adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yangmana pun dan dimana pun.

Henri Fayol membawakan pengertian “administrasi (Peradministration) yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Kontinental), dikalangan bangsa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Adapun di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip adalah “Manajemen” Oleh karena itu, buku Henri Fayol “Administration Industrielle at “Industrial and general management”, suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi membingungkan bagi kita di Indonesia yang menganut pandangan Eropa Kontinental sebagai bekas jajahan Belanda.

Konsep Organisasi

Menurut Louis Allen (2017), Organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Konsep Manajemen

(Terry, 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang disebut manajemen, dan orang yang melakukan disebut manajer. Manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang sangat diperlukan dalam semua kegiatan lini bisnis. Manajemen pemasaran merupakan faktor terpenting untuk kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis agar dapat mencapai tujuan yang diinginkannya.

Konsep Pengawasan

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan, tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Konsep Kosmetik Ilegal

Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, ditekan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, dimasukkan kedalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Konsep Ilegal

Legal adalah istilah yang sering digunakan dalam hukum, untuk mengacu pada sesuatu yang sesuai dengan hukum atau peraturan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan, keputusan, atau kebijakan yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks hukum, legal adalah konsep yang sangat penting karena hukum bertindak sebagai kerangka kerja, yang mengatur tindakan manusia dan melindungi hak individu dan masyarakat secara keseluruhan.

BPOM

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan si konsumen. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar, produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survey deskriptif yang mana penelitian ini menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terjadi dilapangan.

Dalam penulisan proposal ini peneliti akan melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralamat di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156, adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan selesai.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Kosmetik Ilegal di Pekanbaru

1. Standar

Standar merupakan alat control, oleh karena itu penetapan standar dalam planning harus sangat diperhatikan. Mengingat bagaimana akan membandingkan hasil dengan yang diharapkan apabila tidak ada standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dasar ataupun kebijakan- kebijakan yang dibuat untuk dapat menjadi acuan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rusdy Ridho selaku Ketua Tim Penindakan pada penelitian ini hari Senin, 05 Februari 2024 beliau mengatakan :

“ Standar ataupun kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh BPOM sudah dicantumkan di website nya BBPOM yang bisa dilihat dan mana saja yang terjaring, dan yang termasuk dalam undang-undang No 17, jadi semuanya dapat dilihat mulai dari penetapan bahan dan juga kosmetik mana saja yang termasuk. Jadi semuanya ada di halaman website kami baik Instagram, dan juga halaman web”.

Dapat disimpulkan terkait wawancara dari key informan bahwa mereka jauh lebih mengutamakan keuntungan pasar dari pada Kesehatan konsumen, karena dari konsumen itu sendiri juga lebih memilih produk yang reaksinya lebih cepat.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pernyataan tersebut diketahui pula aspek-aspek apa saja yang di awasi oleh BBPOM ialah toko-toko kosmetik, dan lainnya yang dimana didalamnya menjual khususnya produk kosmetik tapi berbeda dengan produk kosmetik yang layak diperjual belikan yang sudah ada standarnya. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ibuk Syahrída selaku Ketua Tim Pemeriksaan pada penelitian hari Selasa, 06 Februari 2024 mengatakan :

“dalam pemeriksaan kita melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar nya, dimana ada pemeriksaan produksi dan pemeriksaan distribusi sebelum melakukan pemeriksaan kami melakukan Analisa masalah yang beracuan dengan ketentuan BBPOM”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan harus terkait dengan rencana dan kedudukan, dimana

dalam permasalahan dilapangan harus ada penentuan Analisa masalah terlebih dahulu dimana dari target dan pencapaian tidak jauh dari rencana kegiatan yang dilaksanakan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Syarnida selaku Ketua Tim Pemeriksaan pada penelitian ini hari Selasa, 06 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa :

“kita memilih 100 sarana kita memilih beberapa dengan Analisa kinerja itu misalnya ditahun lalu ia melakukan kesalahan beberapa lalu tahun ini ia melakukan kesalahan dengan Analisa kinerja itu kita tetapkan untuk menindak lanjuti, dimana tahun ketahun tetap melakukan kesalahan yang sama kita dapat melakukan pemeriksaan itu dimana setelah itu akan dibagi dengan 12 bulan untuk di periksa lebih lanjut dan kita tunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut”.

Dari informasi yang diberikan oleh informan bahwa dari target yang ingin dicapai pasti lebih dari itu dengan adanya Analisa kinerja itu dapat dilihat kemajuan kegiatan yang BBPOM lakukan dalam pengawasan Kosmetik Ilegal.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah membandingkan pelaksanaan atau kegiatan dengan standar untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan kosmetik illegal.

Sedangkan dari sisi Ibu Elvira Yolanda selaku Ketua Tim Penguji pada penelitian ini hari Kamis, 08 Februari 2024 mengatakan :

“ untuk kami ya bagian penguji kami dapat melakukan observasi dimana apa saja yang selalu terulang misalnya dari segi bahan, dari standar kita kan sudah ada ketetapan nya di masalah ini kita melihat bahan yang dilarang seperti merkuri it uterus terulang dari setiap penemuan produk kami melakukan observasi itu agar dapat dihimbau ke bagian yang menaungin untuk lebih meninformasikan bahwa bahan ini selalu ditemukan disetiap penemuan produk”.

Dalam indicator perbandingan ini dimana dalam observasi dapat disimpulkan bahwa pihak BBPOM melakukan peningkatan-peningkatan dan pencapaian yang telah diraih dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan maksud sudah berkurangnya angka dimana produk khususnya kosmetik di Kota Pekanbaru. Meskipun masih banyak kekurangan yang berasal dari faktor-faktor lain saat melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Hasil dari wawancara tersebut informan mengatakan bahwa ketentuan regulasi itu sangatlah menunjang dalam perbaikan penyimpangan, karna dalam beban kerja yang begitu

besar untuk intansi yang terkait ikut serta dengan objektif maka hasil dari perbaikan akan berjalan secara maksimal.

Selanjutnya dari sisi Ibuk Syarnida selaku Ketua Tim Pemeriksaan pada penelitian ini hari Selasa, 06 Februari 2024 mengatakan :

“kalau presentase yang diminta dari kepatuhan itu tidak bis akita deskripsikan karena setiap penemuan pasti berbeda-beda, misalnya gini dari segi pabrik saja dari segi mesin ada ketentuan rpm nyam aka jika didapat lebih dari itu kita akan meminta perbaikan dari produksi itu, apalagi dari pemalsuan itu sangat sulit maka kita membutuhkan laporan dari masyarakat agar dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut, dan untuk itu kita bisa memberikan laporan tersebut kepada kuasa hukum”.

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan koreksi itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk standard yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki keduanya yang dapat dilakukan secara bersamaan.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen yang teliti lebih dapat cerdas memilih produk kosmetik yang layak dikosumsi dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan pengawasan produk kosmetik.

Dalam wawancara dengan Ibu Syarnida dari Ketua Tim Pemeriksaan di BBPOM di Pekanbaru mengatakan :

“Dari 100 sarana tersebut dalam 3 tahun terakhir ini ada 60 sarana yang tidak memenuhi standar ketentuan kalau menurut isi misalnya, terus sisanya diambil untuk sarana yang baru tapi kalau misalkan sarana barunya gak sampai 40 kita ambil dari 3 tahun yang lalu yang kita tidak pernah lagi kesana lagi gitu, nah perencanaan ini kita buat untuk satu tahun. Jadi kalau adanya hambatan dengan adanya perencanaan tadi mungkin tidak begitu terasa ya dengan adanya perencanaan awal tadi”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui pula faktor dalam penghambatan pelaksanaan pengawasan produk kosmetik illegal oleh BBPOM di Pekanbaru, salah satunya ialah oknum penjual yang dalam konteks tidak memenuhi ketentuan.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Banyak konsumen yang masih belum mengerti seperti apa produk kosmetik yang baik dan benar serta rasa ingin mendapatkan hasil yang istan dan cepat sehingga masih terus-menerus membeli produk yang dalam kategori illegal.
- b. Masih adanya sarana yang melanggar stndar ketentuan dalam memproduksi dan menjual produk kosmetik dalam kata lain produsen yang nakal padahal pihak BBPOM sudah melakukan pengawasan bahkan peringatan.

- c. Adanya sarana baru yang melakukan penolakan saat petugas BPOM melakukan pengawasan dikarenakan ketidaktahuan dan rasa takut akan pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini terkait Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentahjo Raya Kabupaten Kuantan Singingi bahwa:

1. Untuk mengukur keberhasilan dalam Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya pada penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Pada kelima indikator ini secara keseluruhannya pada kategori cukup efektif, dengan responden Tenaga Penyuluh Pertanian memiliki rata-rata presentase berjumlah "62,5%", dan responden anggota kelompok tani memiliki rata-rata presentase berjumlah "40,8%". Hal ini juga didukung dari hasil observasi penulis terhadap penelitian ini, Penyuluhan Pertanian sudah dijalankan dengan baik, tetapi hal ini berjalan tidak efektif, alasan dari jawaban ini dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya, dimana hanya memiliki 8 orang tenaga penyuluh pertanian sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Desa. Kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 15 Desa harusnya memiliki 15 orang penyuluh pertanian namun realitanya hanya memiliki 8 orang penyuluh pertanian. Sehingga menyebabkan penyuluh pertanian memiliki wilayah binaan 2 bahkan lebih Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.
2. Tugas penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan kurang terlaksana sehingga menyebabkan salah satu tujuan BPP dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kemampuan pokan belum tercapai hal ini dibuktikan dengan jumlah total keseluruhan kelompok tani berjumlah 216 namun kelompok tani yang aktif hanya berjumlah 97 kelompok tani. Hal ini disebabkan jarak yang harus ditempuh. Dimana jarak yang harus ditempuh penyuluh untuk kelokasi kegiatan 20 km dari tempat tinggal penyuluh dan jalan yang dilalui naik turun bukit. Sehingga efisiensi waktu sangat sulit dalam melakukan aktivitas penyuluhan ke lapangan. Selanjutnya penyuluh lebih sering melakukan kegiatan di kebun petani untuk teknis budidaya dan melakukan monitoring. Dan partisipasi petani pada pertemuan dan kegiatan masih dalam katergori rendah disebabkan, Karena kesibukan pribadi dan bekerja sebagai harian lebih diutamakan oleh anggota kelompok binaan penyuluh. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat bekerja dibidang pertanian.

Kesimpulan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik illegal yaitu pre market dan post market. Dalam pelaksanaan pihak BBPOM memberi kemudahan bagi

masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk kosmetik yang layak dikonsumsi, bagaimana cara mendapatkan izin, standar dari memproduksi dan memasarkan produk kosmetik, peraturan-peraturan yang dapat menjadi dasar untuk memproduksi kosmetik yang dapat diakses dalam website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya juga terdapat laporan tahunan yang dapat dilihat perbandingan pada tiap tahunnya dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ilegal.

Dan dapat dilihat dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik ilegal dengan yang baik dikonsumsi, kurang sumber daya manusia, serta penjual produk kosmetik ilegal yang masih melanggar standar diam-diam melakukan perdagangan tetapi itu juga merupakan faktor dari konsumen yang sudah terbiasa dengan produk yang memberikan hasil instan tanpa memikirkan efek samping setelah pemakaiannya. Diketahui juga sarana yang baru masih sedikit yang paham dalam pemeriksaan yang dilakukan BPOM adalah untuk kebaikan bersama.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Effendi dan Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Terry, George R & Leslie W. Rue. 2014. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Henry Fayal. 1945. General and Industrial Management. Prancisc.
- Hasibuan dan Melayu. 2012. Manajemen Desain Pengertian dan Masalah Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.

- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban

dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318).

Atlantis Press.

- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.